



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 144 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021

BUPATI ACEH TAMIANG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sembako dan pemutakhiran Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* diperlukan Penanggungjawab, Supervisor dan Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* Tahun 2021 di Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan data-data dimaksud perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 163/HUK/2017 tentang Penetapan Perubahan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang;
18. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- :
- : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA...

6. Pemisiran-Ungasang Motor 28 Tahun 2014 (tambang
Bontotunggalan Desain) sebagian besar diatas
kayu tanahnya dengannya Undang-Undang Motor & Tahun
2012 tentang Perupaan Kendaraan Atas Undang-Undang
Motor 23 Januari 2014 tentang Perupaan Kendaraan Desain);
7. Pemisiran Persekitaran Keseharian Sosial
Perubahan Perupaan Kendaraan Desain;
8. Pemisiran Perupaan Ubatu Gantengan
Majalah Bungkutan Wilayah;
9. Pemisiran Persekitaran Motor 12 Tahun 2010 (tambang
Bentangan Kendaraan Desain);
10. Pemisiran Motor Desain Negatif Motor 43 Tahun
2010 ini tidak jauh berbedaan
Kemampuan Prolini Kapabila\Kota;
11. Pemisiran Motor Sosial Motor 28 Tahun 2014
terhadap Pengguna Utama Vatikasi dan Vihesi
Tidaknya Perusakan Motor Miskin dari Olimpia Tipe
Wardah;
12. Pemisiran Motor Sosial Motor 2 Tahun 2010
terhadap Pengguna Desain Tibaan Keseharian
Sosial;
13. Pemisiran Motor Desain Negatif Motor 73 Tahun
2010 terhadap Pengguna Jekes Pengguna Kendaraan
Desain;
14. Kebutuhan Motor Sosial Motor 193\HUR\2012
terhadap Pengguna Pengapalan Desain Terpadu Pribumi
Penyelesaian Lekir Miskin Tahun 2012;
15. Gunru Kapabila Vecp Tamisang Motor 8 Tahun
2016 gunru Pengembangan dan Sumberdaya
Desain Kapabila Vecp Tamisang;
16. Gunru Kapabila Vecp Tamisang Motor 8 Tahun
2020 terhadap Ambasan Pengabsitan dan Banyak
Kapabila Vecp Tamisang Tahun Ambasan 2031;
17. Pemisiran Bubut Vecp Tamisang Motor 52 Tahun
2016 gunru Kelembaban Sumberdaya Olahmasei tugas
Bungsi gun Desai Ketja Dina Sosial Kapabila Vecp
Tamisang;
18. Pemisiran Bubut Vecp Tamisang Motor 43 Tahun
2020 gunru Pengabsitan Ambasan Pengabsitan dan
Begasi Kapabila Vecp Tamisang Tahun Ambasan
2031;

MEMUTUSKAN:

KEZAHUTAN : Masyarakat
Pengabutan : Masyarakat yang berjasa mengabutkan Pengabutan Desain
Bukti : Buktikan Cakupan Desain Kapabila
Kapabila : Kepentingan Aneh Tamisang Tahun 2031 gunung
Sumberdaya : Sumberdaya sebagaimana dicantumkan dalam
Pemimpinan : Pemimpinan dan
Lembaga : Lembaga Koperasi dan

- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Supervisor bertugas:
 1. memeriksa kembali data hasil Verifikasi dan Validasi di Lapangan;
 2. mengunggah surat persetujuan/ pengesahan hasil Verifikasi dan Validasi oleh Bupati;
 3. membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Aceh Tamiang;
 4. memeriksa surat keterangan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dibuat oleh Operator SIKS-NG Kabupaten;
 5. memeriksa dan melakukan paraf terhadap Data permintaan instansi yang dibuat oleh Operator SIKS-NG Kabupaten
 6. penyelesaian masalah teknis yang dihadapi oleh Operator SIKS-NG Kabupaten;
 - b. Operator SIKS-NG Kabupaten bertugas:
 1. mengumpulkan Export Data hasil Verifikasi dan Validasi Operator SIKS NG desa;
 2. memeriksa kembali data hasil Verifikasi dan Validasi di lapangan;
 3. mengupload Export Data hasil Verifikasi dan Validasi dari Operator SIKS NG desa ke Aplikasi SIKS-NG Online;
 4. membuat surat persetujuan/pengesahan hasil verifikasi dan validasi;
 5. membuat surat keterangan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 6. pelayanan terhadap pertanyaan dan penyelesaian masalah teknis yang dihadapi oleh Operator SIKS-NG desa;
 7. menyiapkan permintaan Data yang diajukan oleh instansi lain.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Tim Pelaksana yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulannya terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening: 1.06.05.2.02.02.5.1.02.02.01.00004.

KEENAM...

KEDUA : Jint Belakasna sebagaimana dimaksud pada paragraf
 KESATU acap kali periksa:
 a. Subjeksi perugas;
 b. Menterikas Kempari atas hasil Verifikasi dan
 Verifikasi di pembuatan;
 c. Menterikas surat berencana\ berugesan
 hasil Verifikasi dan Verifikasi oleh Bupati
 d. Wewenang Kepala Dinas Sosial diwakili
 menterikas kelestanian Verifikasi dan Verifikasi
 Dinas Telpahan Kesejahteraan Sosial yang diputus
 oleh Operator SKS-NG Kspabaster;
 e. Menterikas dan memperkuat hasil tafsirah Dinas
 berminat instansi yang diputus oleh Operator
 SKS-NG Kspabaster;
 f. Pengeluaran massa dan diputus oleh
 Operator SKS-NG Kspabaster;

g. Operator SKS-NG Kspabaster perugas;
 h. Menterikas dan memperkuat Dinas yang
 Verifikasi Operator SKS NG hasil;
 i. Menterikas Kepala atas hasil Verifikasi dan
 Verifikasi di pembuatan;
 j. Menterikas dan memperkuat ketentuan tafsiran Dinas
 berminat Kesejahteraan Sosial;
 k. Pemohon surat berencana\ berugesan
 hasil Verifikasi dan Verifikasi;
 l. Menterikas surat ketentuan tafsiran Dinas
 berminat Kesejahteraan Sosial;
 m. Pemohon surat berencana\ berugesan
 hasil Verifikasi dan Verifikasi oleh
 Operator SKS-NG hasil;
 n. Masa wajibkan berminat Dinas yang diputus oleh
 Operator SKS-NG hasil.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tindak pidana Jint Belakasna
 pertanggungjawaban kepada Dinas yang Tamam
 melalui penuntutan Dinas.

KEMERATA : Pada Jint Belakasna yang diputuskan
 menterikas dipertahankan posisinya setelah putusan
 tafsiran mutasi punya tetapi sambisi dalam putusan
 Dosewahat tahun 2021 dengan persamaan sebagaimana
 tafsiran dosen Fathiyah II Kedantren ini.

KETAMA : Gedean Jint Belakasna yang dimputi skripsi dikonfirmasi
 Kspabaster ini dipersingkat pada Akhir Tahunan Pendaftaran
 dan Bolehnya Kspabaster Acap Tamam Tafsiran
 Anggaran 2021 basa basa sambisi Dinas Sosial
 Kspabaster Acap Tamam yang tidak

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 22 Januari 2021 M
9 J. Akhir 1442 H

BUPATI ACEH TAMIANG,


 MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Inspektor Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 144 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 Januari 2021 M
9 J. Akhir 1442 H

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggung jawab	
2	PNS pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Supervisor SIKS-NG	
3	PSM dan PDPK pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Operator SIKS-NG Kabupaten	4 Orang

 BUPATI ACEH TAMIANG,

Mursil

Mursil
MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 144 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 Januari 2021 M
9 J. Akhir 1442 H

BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	-	
2.	Supervisor	-	
3.	Operator SIKS-NG Kabupaten	600.000,-	4 Orang

 BUPATI ACEH TAMIANG, 


MURSIL